

PROFIL KELURAHAN

TOPOGRAFI DAN DEMOGRAFI KELURAHAN RAWA BARAT

TOPOGRAFI



Luas Wilayah
69,24 HA

Batas Wilayah

Sisi Utara
Kelurahan Selong

Sisi Barat
Kelurahan Selong

Sisi Timur
Kelurahan Kuningan Barat (Kali Krukut)

Sisi Selatan
Kelurahan Petogogan



DEMOGRAFI



**Jumlah
Penduduk**
6,637 Jiwa



3,211
Jiwa



3,426
Jiwa

Wilayah
Administrasi



7 RW



44 RT



2.341
Kepala Keluarga

KEKURAHAN RAWA BARAI

Jl. Senayan No. 30 RT.006/06
Kebayoran Baru Jakarta Selatan

☎ (021) 7222409 📷 kelurahanrawabarat

PETA WILAYAH KELURAHAN RAWA BARAT

Rev. Est.

28. <http://www.kay-bay.com/links/links.cfm>

Lactate dehydrogenase

Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.

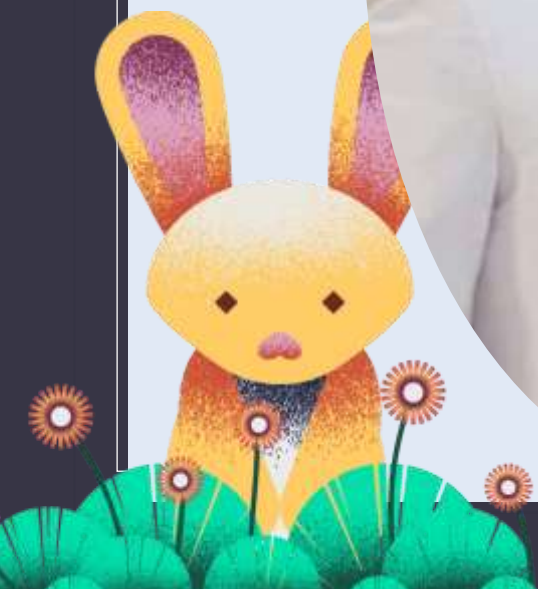
Dr. K. S. Narayana

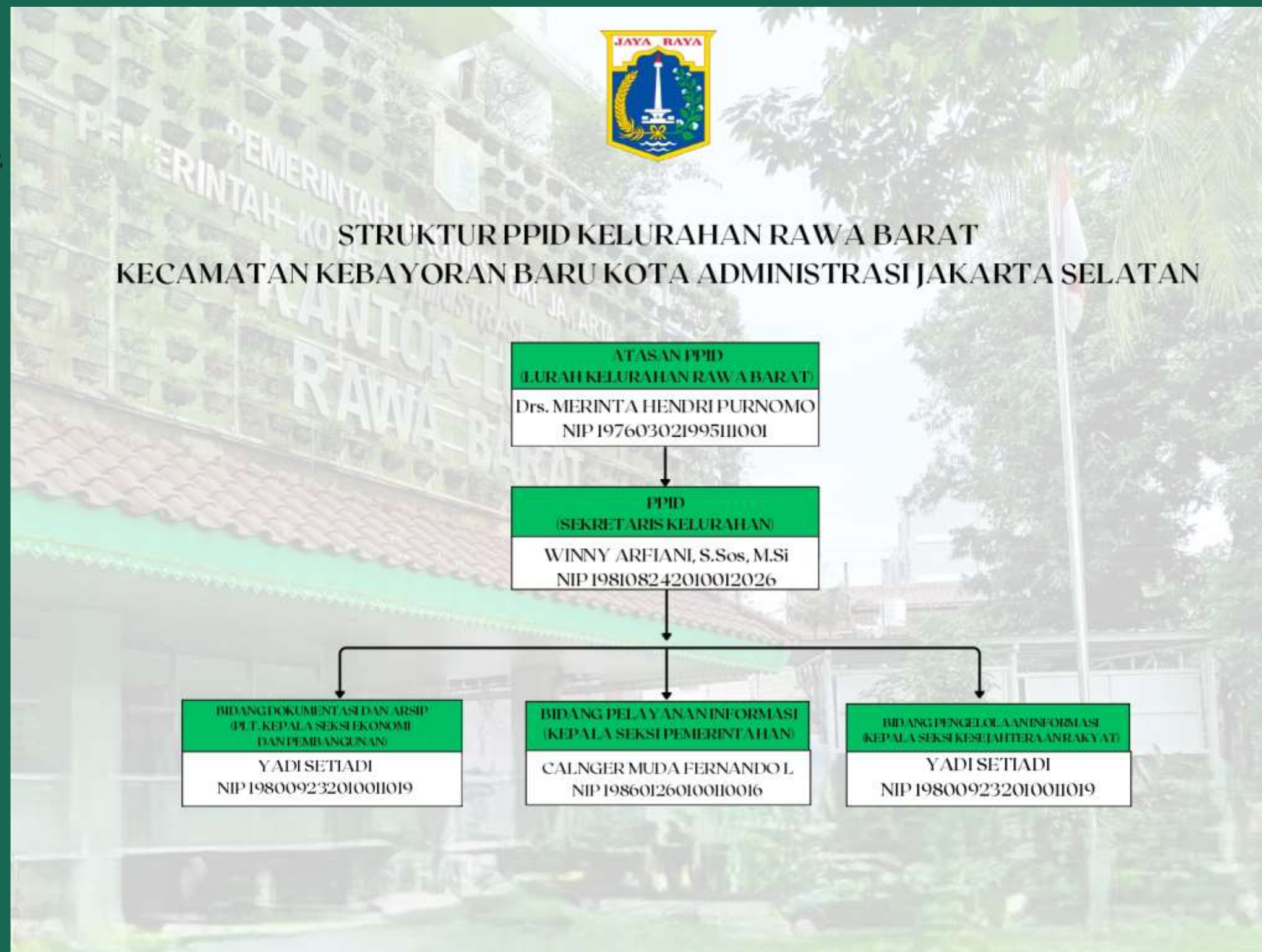
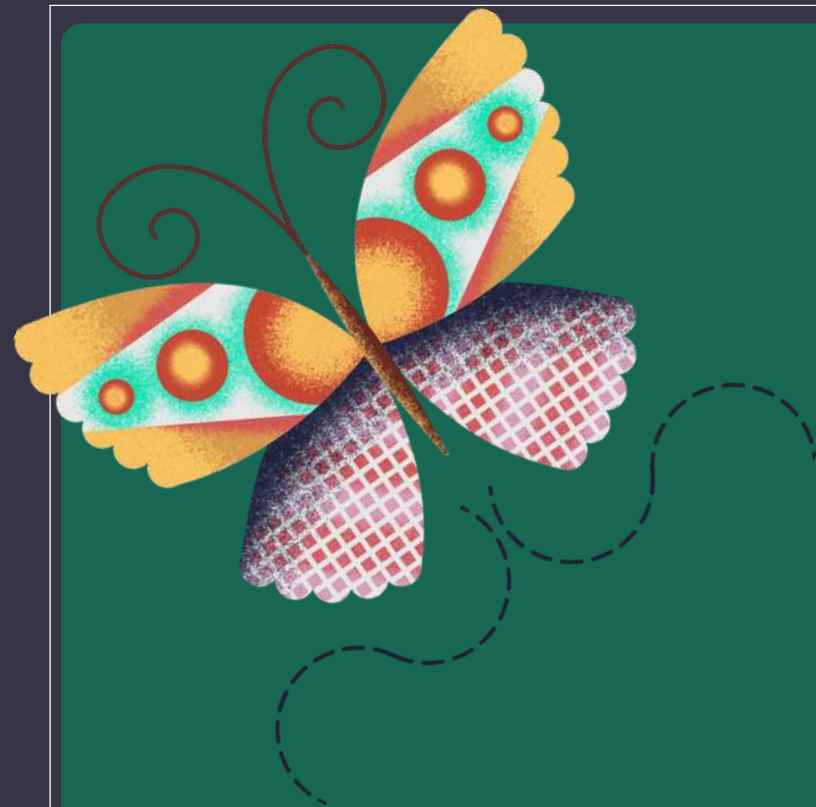
BIODATA LURAH

DRS. MERINTA HENDRI PURNOMO



- TEMPAT ,TANGGAL LAHIR : Boyolali, 02 Maret 1976
- RIWAYAT PENDIDIKAN : – S1 : INSTITUT PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI (2004)
- RIWAYAT JABATAN : LURAH RAWA BARAT 2023
LURAH SETIA BUDI 2015 S.D 2023
LURAH CIPETE SELATAN 2012 S.D 2015
LURAH GUNTUR 2009 S.D 2012
WAKIL LURAH SEMANGGI 2005 S.D 2009
SEKKEL SEMANGGI 2004 S.D 2005





VISI & MISI



panrb
KEMENTERIAN
PERENCANAAN KEMAJAHOON
NUSANTARA

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. Memberikan jawaban permohonan informasi dan tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
5. Menyediakan Daftar Informasi Publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
6. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin penyediaan seluruh informasi publik yang terbuka dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman, dan tertata baik;
8. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
9. Tidak meminta pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan layanan informasi publik;
10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2023

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI DKI JAKARTA

Selaku

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PROVINSI DKI JAKARTA,



SIGIT WIJATMOKO
NIP. 197408301993111001



TUGAS DAN FUNGSI PPID



Tugas PPID

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik, PPID pada SKPD/UKPD mempunyai tugas, yaitu:

1. memberikan layanan informasi kepada publik;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya; d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
6. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
7. membuat laporan pelayanan informasi; dan
8. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.



Fungsi PPID

Melakukan Pembinaan dan pengelolaan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.





KELURAHAN RAWA BARAT

KEPUTUSAN LURAH RAWA BARAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN RAWA BARAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH RAWA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD);
 - bahwa Layanan Informasi Publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berstatus di setiap SKPD/UKPD dan merupakan tugas dari bagian/subbagian yang mengelola ketatausahaan, data, informasi dan dokumentasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Rawa Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Rawa Barat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

-2-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 542);
 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201);
 - Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 7034);
 - Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);
 - Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
 - Keputusan Gubernur Nomor 1858 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
 - Keputusan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

-3-

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN RAWA BARAT TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR KELURAHAN RAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU :
- Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan susunan Tim dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA :
- Dalam melaksanakan tugas dan wewenangny Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Rawa Barat sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU berpedoman pada ketentuan Pasal 22 Ayat 2 dan Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan operasionalnya mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- KETIGA :
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Rawa Barat sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU wajib memberikan laporan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat Kecamatan secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan dan memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT :
- Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 30 Juli 2025

LURAH KELURAHAN RAWA BARAT,

Dr. Merita Hendri Purnomo
NP19703021995111001

- Tembusan :
- Wakil Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - Camat Kebayoran Baru.

-4-

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Rawa Barat
Nomor : 34 Tahun 2025
Tanggal : 30 Juli 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN RAWA BARAT

JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Lurah Kelurahan Rawa Barat
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Kelurahan Rawa Barat
Bidang Tugas	Penanggung Jawab
• Bidang Pengelolaan Informasi	• Koordinator : Ka. Sekel Ekonomi Pembangunan Kelurahan Rawa Barat • Anggota : Staf Sekel Ekonomi dan Pembangunan Kel. Rawa Barat
• Bidang Dokumentasi dan Arsip	• Koordinator : Ka. Sekel Pemerintahan Kelurahan Rawa Barat • Anggota : Staf Sekel Pemerintahan Kel. Rawa Barat
• Bidang Pelayanan Informasi	• Koordinator : Ka. Sekel Kesejahteraan Rakyat • Anggota : Staf Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Rawa Barat • Staf Sekel Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Rawa Barat

LURAH KELURAHAN RAWA BARAT,

Dr. Merita Hendri Purnomo
NP19703021995111001

-5-

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Rawa Barat
Nomor : 34 Tahun 2025
Tanggal : 30 Juli 2025

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN TUGAS
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	• memberikan arahan dan petunjuk dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan; • sebagai penentu akhir pengendalian kebijakan apabila muncul masalah dalam pelaksanaan dan pelaksanaan layanan informasi; • mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan; • memantau pelaksanaan kebijakan atas tindakan dan pemberian informasi publik; • memberikan tanggapan atas keluhan yang diajukan dan pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan secara tertulis dan • sebagai perwakilan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam proses sengketa informasi.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	• mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada SKPD/UKPD; • mengorganisir, mendokumentasikan, menyebarkan dan member pelayanan informasi kepada publik; • melakukan koordinasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang diajukan dari PPID pada SKPD/UKPD; • melakukan pemeliharaan informasi dan dokumentasi; • menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses dan pemohon informasi publik; • melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji keterbukaan atas informasi yang disediakan; • melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID pada SKPD/UKPD; • melakukan koordinasi dan komunikasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi; • membuat laporan pelayanan informasi dan melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
Bidang Pengelola Informasi	• pelayanan data dan informasi melalui website http://ppid.kota.go.id dan/atau portal pengumuman di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta; • menyediakan informasi yang disediakan dengan kualitas informasi dan • mempermudah pemeliharaan database pangkalan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Bidang Dokumentasi dan Arsip	• melaksanakan pendokumentasian, pengorganisir, pengontrolan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, perjanjian dan keputusan serta arsip dan dokumen lainnya dan.

-6-

Bidang Pelayanan Informasi	• pelayanan pengumpulan, arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, perjanjian dan keputusan serta arsip dan dokumen lainnya; • memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi; • menerima dan melayani permohonan informasi serta menyerahkan salinan informasi yang diminta; • menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami dan memuaskan, dengan memperhatikan menggunakan bahasa lokal yang digunakan dan masyarakat penduduk setempat; • memberikan pelayanan informasi dan pemohon kepada PPID pada SKPD/UKPD apabila tidak berada dalam daftar informasi yang disediakan; • melakukan pemeliharaan informasi publik dalam sistem pengumpul permohonan informasi tidak terdapat serta membantu, mengorganisir arsip pengumpul permohonan informasi tersebut dan; • memberikan pelayanan pendataan dan pemenuhan kebutuhan pemohon informasi kepada Bidang Pengelola dan Penyelesaian Sengketa.
Anggota	• membantu tugas-tugas koordinasi PPID Kelurahan Rawa Barat.

LURAH KELURAHAN RAWA BARAT,

Dr. Merita Hendri Purnomo
NP19703021995111001

TERIMA KASIH



@kelurahanrawabarat

